Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sumber Daya
https://journal.synrise.org/index.php/jhtra
e-ISSN : 3165-1631
Vol 1, Issue 1, 2026
pp. 24-32

Strategi Kendali Ekonomi Politik Perusahaan Multinasional Corporation dan Transnational Corporation

Fendi Fanaldy
Institut Elkatarie, Lombik Timur, Indonesia

*Corresponding email: *fendi.fenaldy.@lkatarie.ac.id*

Article Info

Article history:

Received: 11-09-2026
Revised: 27-09-2026
Accepted: 10-10-2026

Keywords:

Multinational Corporation, Ekonomi Politik, Asia Tenggara, Kekuasaan Global

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana *Multinational Corporation* (MNC) berperan sebagai aktor politik dalam mengendalikan dinamika ekonomi-politik di kawasan Asia Tenggara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menelusuri strategi kendali yang dijalankan korporasi global melalui mekanisme investasi, pengaruh regulasi, dan hubungan diplomatik dengan negara tuan rumah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pakar ekonomi-politik, analisis dokumen kebijakan investasi asing, serta laporan lembaga internasional seperti *UNCTAD* dan *World Bank*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MNC tidak hanya bertindak sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang mampu membentuk arah kebijakan publik melalui tekanan ekonomi dan aliansi strategis dengan elite lokal. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh MNC melampaui batas ekonomi dan berimplikasi langsung terhadap kedaulatan politik negara-negara Asia Tenggara.

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi dalam beberapa dekade terakhir telah memperkuat peran perusahaan-perusahaan multinasional (*Multinational Corporation*s atau MNC) sebagai aktor sentral dalam tata ekonomi dunia. Aliran modal, teknologi, dan barang lintas-batas yang dipimpin oleh entitas korporasi besar menjadikan MNC tidak sekadar pelaku pasar, melainkan juga agen dengan kapasitas memengaruhi kebijakan, infrastruktur, dan kelembagaan di negara-host (tujuan investasi). Di kawasan Asia Tenggara, kecenderungan ini semakin jelas: arsitektur investasi global dan permintaan modal privat menempatkan negara-negara di kawasan pada posisi tawar yang kompleks di hadapan korporasi transnasional. Tren masuknya investasi asing langsung (FDI) dan peran rantai pasok global membuka peluang pertumbuhan, tetapi juga menimbulkan ketergantungan struktural yang memengaruhi kapasitas negara untuk merumuskan kebijakan ekonomi-politik yang otonom. Laporan-laporan investasi internasional menunjukkan bahwa Asia Tenggara terus menjadi tujuan utama FDI regional, sebuah kondisi yang memperbesar pengaruh aktor-aktor korporasi terhadap perekonomian lokal dan kebijakan publik.

Fenomena MNC sebagai aktor politik di mana korporasi menggunakan sumber daya ekonomi, jaringan, dan kemampuan lobi untuk memengaruhi perumusan kebijakan publik bukanlah hal baru dalam literatur ilmu sosial. Kajian tentang *corporate political activity* (CPA) dan hubungan antara bisnis dan negara telah berkembang pesat, mengintegrasikan perspektif manajemen, ilmu politik, ekonomi politik internasional, dan sosiologi. Ringkasan tinjauan literatur menemukan beragam mekanisme yang digunakan perusahaan untuk memengaruhi kebijakan: dari lobi formal dan pendanaan politik, partisipasi dalam konsultasi kebijakan, hingga bentuk-bentuk pengaruh yang lebih halus seperti penempatan personel di posisi strategis, atau kerjasama strategis

How to cite: Example: Fanaldy. F. (2026). Strategi Kendali Ekonomi Politik Perusahaan Multinasional Corporation dan Transnational Corporation. JHTRA: *Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sumber Daya*, *1*(1), 24–32.

dengan elite lokal. Kajian-kajian tersebut memberikan kerangka konseptual yang berguna untuk menganalisis bagaimana MNC beroperasi tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai aktor politik yang memanipulasi struktur kelembagaan di negara tuan rumah.

Di Asia Tenggara, dinamika ini menjadi sangat kompleks karena pluralitas rezim politik, variasi kapasitas negara, dan heterogenitas struktur ekonomi. Negara-negara di kawasan ini berada pada spektrum yang lebar dari negara dengan kapasitas regulatif yang kuat hingga negara yang sangat bergantung pada modal asing untuk pembangunan infrastruktur dasar. Dalam konteks tersebut, praktik-praktik MNC berbeda-beda: ada yang menekankan pendekatan korporasi yang mematuhi norma lokal dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, namun terdapat pula praktik yang mengarah pada eksploitasi sumber daya, pembentukan oligopoli pasar, atau manipulasi kebijakan fiskal dan pajak yang merugikan kepentingan publik. Penelitian-penelitian tentang hubungan pemerintah-bisnis di perkotaan Asia Tenggara menegaskan bahwa relasi ini sering kali bersandar pada jaringan patronase, koalisi antara elite bisnis dan politik, serta kerangka kelembagaan yang lentur terhadap tekanan korporasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai batas-batas kedaulatan negara dalam menghadapi kekuatan ekonomi transnasional.

Secara teoretis, fenomena keterikatan negara berkembang pada investasi dan struktur produksi global sering dianalisis melalui lensa dependency theory dan world-systems theory. Kedua pendekatan tersebut menggarisbawahi bahwa alur investasi dan perdagangan internasional tidak selalu mengarah pada pembangunan nasional yang setara; sebaliknya, hubungan asimetris antara pusat (negara maju dan korporasi global) dan periferi (negara berkembang) bisa memperdalam ketergantungan ekonomi, memerpetakan kapasitas negara dalam menentukan kebijakan industri dan kebijakan publik lain yang kritikal. Dalam studi-studi kontemporer, konsep dependent development dan analisis jaringan institusional memperlihatkan bagaimana perusahaan multinasional, bersama dengan aktor keuangan internasional dan elite domestik, membentuk pola pembangunan yang terkadang melanggengkan ketergantungan struktural. Analisis ini menjadi relevan ketika kita melihat strategi-strategi MNC yang tidak hanya berorientasi profit jangka pendek, tetapi juga berupaya mengamankan posisi institusional yang dapat mempengaruhi aturan permainan ekonomi-politik di tingkat negara.

Untuk konteks Asia Tenggara, data empiris makro juga mendukung gambaran penguatan peran MNC. Laporan investasi dan statistik FDI mencatat peningkatan aliran modal ke wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir, menempatkan ASEAN sebagai salah satu destinasi FDI utama di antara negara-negara berkembang. Peningkatan ini memperbesar ruang negosiasi korporasi untuk menuntut insentif fiskal, perlakuan khusus dalam regulasi, atau kemudahan akses terhadap tanah dan sumber daya. Di sisi lain, negara tuan rumah sering menggunakan kebijakan insentif untuk menarik investasi sebuah strategi yang, meskipun berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi, berisiko menciptakan kompetisi kebijakan (race-to-the-bottom) antar negara untuk menawarkan kondisi paling menguntungkan bagi korporasi, sering kali dengan mengorbankan kepentingan publik. Kondisi ini membutuhkan analisis yang teliti tentang bagaimana strategi kendali MNC beroperasi di lapangan, baik secara formal maupun melalui mekanisme informal.

Penelitian empiris di tingkat nasional menunjukkan beragam bentuk pengaruh korporasi terhadap kebijakan domestik. Di Indonesia, misalnya, studi-studi kasus pada sektor media, agribisnis, dan pertambangan menunjukkan bahwa konglomerasi dan perusahaan multinasional dapat mempengaruhi kebijakan publik, tata kelola sumber daya, serta praktik pemberitaan yang berdampak pada opini publik dan proses politik. Penelitian lokal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor korporasi sering memainkan peran ganda: sebagai penyedia modal dan teknologi serta sebagai aktor yang mampu menekan atau memanfaatkan regulasi demi kepentingan bisnisnya. Temuan tersebut menegaskan pentingnya kajian kualitatif yang mendalam untuk memahami mekanisme, jaringan, dan strategi yang digunakan, karena banyak praktik pengaruh korporasi

terekspos melalui relasi personal, jaringan institusional, dan praktik administratif yang tidak selalu terekam dalam data kuantitatif.

Mekanisme pengaruh yang digunakan oleh MNC beragam dan sering bersifat saling melengkapi. Dalam literatur CPA, beberapa mekanisme utama yang diidentifikasi meliputi: (1) lobi langsung dan advokasi kebijakan; (2) pembiayaan kampanye politik dan hubungan dengan partai/para pengambil keputusan; (3) partisipasi dalam proses konsultasi regulatif dan penyusunan standar teknis; (4) pengaturan kontraktual yang mengikat pemerintah pada kondisi-kondisi tertentu (mis. perjanjian investasi, zoning deals); serta (5) strategi jaringan transnasional misalnya kerja sama dengan aktor internasional seperti lembaga keuangan dan asosiasi perdagangan yang melobi untuk aturan global menguntungkan. Analisis semacam ini penting karena menempatkan tindakan MNC dalam spektrum alat politik yang lebih luas, bukan hanya aktivitas bisnis biasa.

Namun, pengaruh MNC tidak selalu bersifat deterministik atau memonopoli ruang politik. Negara tuan rumah tetap memiliki kapasitas adaptif melalui regulasi, pemerintahan kuat, atau koalisi politik-bureaukratis yang dapat menegosiasikan syarat investasi. Ada pula kasus negara yang sukses menggunakan FDI untuk mendorong industrialisasi lokal dengan mekanisme persyaratan transfer teknologi, lokal content, dan kebijakan penguatan industri domestik. Kunci perbedaan hasil ini sering terletak pada kapasitas institusional, transparansi tata kelola, dan kemampuan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan terhadap perjanjian-perjanjian antarpihak. Kerangka analitis yang memperhitungkan variabel-variabel tersebut membantu menjelaskan mengapa pengaruh MNC bervariasi antarnegara dan antarsektor.

Di samping itu, dinamika geopolitik global misalnya kompetisi antara China dan AS, atau tekanan deglobalisasi sebagian mempengaruhi strategi korporasi transnasional. Perubahan aliran modal, rerouting rantai pasok, dan kebijakan proteksionis memaksa MNC menyesuaikan strategi investasi dan pengaruh politik mereka: dari penguatan lobi terhadap negara tuan rumah, hingga pembentukan aliansi strategis dengan negara-negara mitra baru. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa ketika tekanan geopolitik meningkat, MNC sering memprioritaskan stabilitas investasi jangka pendek melalui perjanjian bilateral atau kesepakatan fiskal, yang pada gilirannya dapat membatasi ruang kebijakan domestik untuk mengambil tindakan kebijakan yang lebih berorientasi pada publik luas. Kondisi ini menambah dimensi baru pada analisis kendali ekonomi-politik MNC.

Dengan latar belakang tersebut, penting bagi kajian akademik untuk menggali lebih dalam: (1) bagaimana bentuk konkret praktik kendali yang diterapkan oleh MNC di tingkat operasional dan kebijakan; (2) jaringan aktor apa saja yang terlibat termasuk aktor domestik seperti elite politik, birokrat, konglomerasi lokal, dan asosiasi bisnis; (3) bagaimana konteks sektoral (mis. pertambangan, energi, teknologi) mempengaruhi taktik dan hasil pengaruh korporasi; serta (4) bagaimana masyarakat sipil dan mekanisme akuntabilitas domestik merespons pengaruh tersebut. Pendekatan kualitatif menawarkan keuntungan besar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena mampu menangkap nuansa relasi kekuasaan, praktik informal, dan narasi aktor yang sering luput dari survei kuantitatif.

Selain itu, kajian ini juga perlu memperhatikan dimensi etis dan normative: sejauh mana negara sebaiknya mengizinkan insentif besar kepada investor asing demi pembangunan ekonomi jangka pendek, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan modal dengan perlindungan hak-hak publik, lingkungan, serta kedaulatan kebijakan nasional. Pertimbangan ini bukan hanya akademis, tetapi sangat praktis: kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek ini dapat menimbulkan resistensi sosial, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan distribusi ekonomi yang jangka panjang. Oleh karena itu, sebuah studi kualitatif yang menelaah strategi kendali MNC sekaligus mengevaluasi implikasi normatifnya sangat relevan bagi pembuat kebijakan, aktor masyarakat sipil, dan komunitas akademik.

Secara metodologis, penelitian kualitatif ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang praktik-praktik yang melekat pada relasi MNC negara di Asia Tenggara.

Pendekatan studi kasus komparatif (mis. memilih 2–3 negara di kawasan yang mewakili variasi kapasitas negara dan profil investasi) akan memungkinkan analisis kontrastif antara pola pengaruh yang berbeda. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan aktor kunci (pejabat pemerintah, perwakilan korporasi, akademisi, aktivis masyarakat sipil), analisis dokumen kebijakan dan perjanjian investasi, serta pemetaan jaringan aktor (network analysis) untuk menelusuri jalur pengaruh formal dan informal. Analisis tematik terhadap data kualitatif ini diharapkan mampu memunculkan kategori-kategori teoretis yang menjelaskan mekanisme kendali MNC dan dampaknya terhadap otonomi kebijakan nasional.

Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah empiris dan teoretis: empiris dengan menyajikan bukti lapangan konkret tentang praktik strategi kendali MNC di Asia Tenggara; teoretis dengan menguji relevansi kerangka CPA dan dependency dalam menjelaskan relasi kekuasaan ekonomi-politik masa kini. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pada literatur ilmu politik ekonomi internasional serta menyodorkan rekomendasi kebijakan praktis untuk negara-negara tuan rumah agar dapat menegosiasikan hubungan dengan korporasi transnasional secara lebih seimbang dan berdaulat.

Akhir kata, pendahuluan ini menegaskan perlunya studi kualitatif yang komprehensif dan kontekstual tentang peran MNC sebagai aktor politik di Asia Tenggara. Di tengah arus investasi global yang dinamis dan tensi geopolitik yang meningkat, memahami strategi-strategi kendali MNC bukan hanya penting bagi akademisi, tetapi juga krusial bagi pembuat kebijakan, komunitas bisnis lokal, serta masyarakat sipil yang menjadi subjek dan objek dari praktik-praktik pengaruh tersebut. Studi ini berangkat dari keyakinan bahwa dengan pemahaman yang lebih baik terhadap mekanisme pengaruh, negara-negara di Asia Tenggara dapat merumuskan kebijakan yang mempertahankan ruang publik dan kedaulatan kebijakan sambil tetap memanfaatkan manfaat ekonomi dari investasi asing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, pola, dan strategi kendali yang dijalankan oleh *Multinational Corporation* (MNC) dalam konteks ekonomi-politik Asia Tenggara. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan sekadar untuk mengukur dampak ekonomi, tetapi untuk menafsirkan relasi kekuasaan, interaksi antaraktor, serta konstruksi makna di balik kebijakan dan praktik bisnis global. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif menekankan pada interpretasi makna terhadap fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan dalam konteks alami. Dengan demikian, metode ini relevan untuk menggali strategi kendali ekonomi-politik yang bersifat kompleks dan tidak selalu tampak secara eksplisit dalam dokumen formal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi literatur kebijakan investasi. Wawancara dilakukan terhadap pakar ekonomi-politik, pejabat pemerintah bidang investasi, serta perwakilan korporasi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki keterlibatan dalam isu hubungan antara bisnis dan negara. Sumber data sekunder mencakup laporan lembaga internasional seperti *UNCTAD* dan *World Bank*, peraturan investasi nasional, serta publikasi akademik terkait pengaruh MNC di Asia Tenggara. Menurut Moleong (2019), penggunaan berbagai sumber data (triangulasi) merupakan langkah penting untuk meningkatkan validitas dan keabsahan hasil penelitian kualitatif.

Analisis data menggunakan metode analisis tematik, yaitu proses pengorganisasian data dalam tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan dokumen. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2014) dalam kerangka interactive model of qualitative data analysis. Tema-tema yang dikembangkan mencakup strategi regulatif, diplomatik, dan hegemonik yang dijalankan oleh MNC,

serta bagaimana strategi tersebut berinteraksi dengan konteks politik dan kelembagaan negara tuan rumah.

Dalam proses penelitian, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam pengumpulan dan interpretasi data. Oleh karena itu, refleksivitas dan kesadaran terhadap bias interpretatif menjadi hal penting. Sebagaimana dikemukakan oleh Bungin (2020), dalam penelitian sosial, posisi peneliti tidak bisa sepenuhnya netral; justru pemahaman reflektif terhadap posisi dan nilai-nilai peneliti menjadi kekuatan dalam menafsirkan fenomena sosial secara mendalam. Untuk menjaga kredibilitas hasil, dilakukan validasi data melalui *member checking* dan diskusi sejawat (*peer debriefing*).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi temuan, melainkan memberikan pemahaman kontekstual yang kaya tentang strategi kendali MNC di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap pola relasi kekuasaan yang tersembunyi di balik kebijakan ekonomi, serta memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas negara dalam menghadapi tekanan politik-ekonomi dari aktor korporasi global. Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi politik global dengan perspektif lokal yang lebih reflektif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Multinational Corporation* (MNC) memiliki posisi dominan dalam tatanan ekonomi-politik Asia Tenggara, terutama melalui pengendalian investasi strategis di sektor energi, telekomunikasi, dan manufaktur. Dominasi ini bukan hanya ekonomi, melainkan juga bersifat politis melalui mekanisme pengaruh terhadap kebijakan negara. Menurut Suwarno (2022), perusahaan multinasional berperan dalam membentuk arah kebijakan ekonomi nasional melalui lobi-lobi ekonomi dan diplomasi korporasi, yang sering kali lebih efektif dibandingkan mekanisme diplomasi negara tradisional. Temuan ini menegaskan bahwa kekuatan ekonomi global telah bergeser dari negara ke entitas korporasi.

MNC menjalankan strategi kendali melalui dua jalur utama: *regulatory capture* dan policy deregulation. Dalam konteks Asia Tenggara, banyak negara melakukan deregulasi investasi untuk menarik modal asing, tetapi langkah ini sering kali melemahkan kedaulatan ekonomi nasional. Penelitian oleh Hadi dan Rahman (2023) menunjukkan bahwa deregulasi sektor energi di Indonesia dan Malaysia memperluas penetrasi korporasi asing, sehingga pengendalian sumber daya strategis semakin berpindah ke tangan entitas transnasional. Hal ini memperlihatkan bahwa liberalisasi ekonomi tanpa proteksi nasional dapat menciptakan ketergantungan struktural.

Dalam praktiknya, MNC memanfaatkan diplomasi ekonomi untuk memperkuat pengaruh politik mereka. Perusahaan seperti Chevron, Unilever, dan Samsung tidak hanya melakukan ekspansi bisnis, tetapi juga menjadi mediator antara pemerintah dan lembaga internasional. Lim dan Lee (2021) dalam jurnal Asian Economic Policy Review menekankan bahwa diplomasi korporasi kini menjadi instrumen geopolitik baru di kawasan ASEAN, di mana korporasi berperan sebagai agen representatif kepentingan negara asal mereka, terutama Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Selain melalui kebijakan, MNC juga menanamkan ideologi kapitalisme global melalui media dan gaya hidup konsumtif. Produk global seperti Coca-Cola atau Apple membawa nilai-nilai individualisme dan efisiensi yang menggantikan nilai-nilai komunal lokal. Priyono (2022) menyebut fenomena ini sebagai cultural hegemony korporasi global, di mana ideologi pasar bebas dijustifikasi sebagai bentuk modernitas. Dalam konteks ini, dominasi ekonomi-politik beroperasi juga di ranah simbolik dan kultural.

Analisis menunjukkan bahwa negara-negara berkembang di Asia Tenggara sering kali kehilangan otonomi dalam menentukan kebijakan ekonomi strategis karena tekanan diplomatik dan ketergantungan terhadap modal asing. Heryanto (2022) menyoroti bahwa kondisi ini melahirkan

"dependent capitalism," di mana negara menjadi perpanjangan tangan korporasi global. Struktur ekonomi-politik yang terbentuk menciptakan asimetri kekuasaan antara korporasi global dan pemerintah nasional.

Korporasi global tidak selalu menggunakan jalur formal dalam mengendalikan kebijakan. Mereka memanfaatkan jaringan think-tank, lembaga riset, serta kampanye CSR untuk membangun citra positif dan memengaruhi persepsi publik. Rahim dan Ahmad (2023) menjelaskan bahwa program CSR sering digunakan sebagai instrumen politik lunak (*soft power*) yang menormalisasi dominasi ekonomi korporasi dalam masyarakat lokal. CSR dalam konteks ini tidak selalu bermakna etis, melainkan strategis.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah nasional di Asia Tenggara tidak sepenuhnya pasif; mereka juga berperan sebagai mediator antara kepentingan nasional dan kepentingan korporasi. Namun, peran ini sering kali dilemahkan oleh tekanan ekonomi global. Widodo (2021) menyatakan bahwa dalam konteks neoliberal, negara kehilangan fungsi regulatifnya karena bergeser menjadi fasilitator pasar. Negara bukan lagi aktor utama, tetapi hanya bagian dari struktur tata kelola global yang dikendalikan oleh korporasi.

Keterlibatan korporasi global dalam pembuatan kebijakan nasional memperlihatkan adanya transformasi besar dalam struktur ekonomi-politik global. Strange (1996) telah lama mengingatkan bahwa kekuasaan dalam ekonomi global telah beralih dari negara ke pasar. Temuan penelitian ini memperkuat tesis tersebut dengan menunjukkan bahwa kekuasaan kini bukan hanya milik pasar, tetapi terpusat pada segelintir entitas korporasi transnasional yang memiliki pengaruh lintas batas.

Kehadiran MNC juga menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Investasi besar tidak selalu menciptakan kesejahteraan yang merata, melainkan memperdalam jurang sosial. Putri dan Sari (2023) menemukan bahwa ekspansi korporasi asing di sektor perkebunan Indonesia meningkatkan eksploitasi tenaga kerja dan degradasi lingkungan. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan MNC bersifat eksklusif dan elitis.

Negara-negara ASEAN kini menghadapi dilema antara mempertahankan nasionalisme ekonomi dan membuka diri terhadap globalisasi. Anwar (2022) menegaskan bahwa nasionalisme ekonomi sering kali diposisikan berlawanan dengan efisiensi pasar bebas. Dalam praktiknya, MNC menggunakan narasi efisiensi dan investasi untuk melemahkan kebijakan protektif negara. Akibatnya, ruang kedaulatan negara semakin menyempit.

ASEAN mencoba menjadi wadah untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan korporasi, tetapi mekanisme regional ini masih lemah secara politik. Berdasarkan temuan wawancara, ASEAN lebih banyak berfungsi sebagai forum ekonomi daripada lembaga pengatur. Lim (2021) menyebut bahwa ASEAN cenderung melindungi kepentingan korporasi melalui kebijakan integrasi pasar yang berpihak pada investor asing. Ini memperlihatkan keterbatasan integrasi regional sebagai alat kontrol terhadap korporasi global.

Akuntabilitas korporasi global masih menjadi masalah besar. MNC beroperasi lintas yurisdiksi, sehingga sulit dimintai pertanggungjawaban hukum atas dampak sosial dan lingkungan. Susanti (2023) menekankan perlunya tata kelola global yang mengatur perilaku korporasi transnasional melalui mekanisme etika bisnis internasional. Namun hingga kini, regulasi tersebut masih bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Gerakan masyarakat sipil di beberapa negara mulai menantang dominasi korporasi melalui advokasi dan kampanye internasional. Misalnya, kampanye Fair Trade dan Anti-Exploitation Movement di Filipina dan Indonesia. Wijaya (2023) menemukan bahwa masyarakat sipil menjadi kekuatan moral yang menuntut transparansi dan akuntabilitas korporasi global, meski sering kali menghadapi represi dan kriminalisasi oleh aparat negara.

Temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya reorientasi dalam teori ekonomi politik global. Model lama yang menempatkan negara sebagai pusat kekuasaan sudah tidak relevan. Gill (2003) menekankan pentingnya konsep new constitutionalism dalam memahami bagaimana

korporasi global menstrukturkan aturan internasional untuk keuntungan sendiri. Dalam konteks Asia Tenggara, fenomena ini tampak dalam harmonisasi kebijakan investasi yang meniru kepentingan kapital global.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa strategi kendali ekonomi-politik korporasi global telah menciptakan bentuk baru hegemoni transnasional yang mengancam kedaulatan ekonomi negara berkembang. Diperlukan kebijakan nasional yang lebih progresif untuk menyeimbangkan hubungan antara negara dan korporasi. Pemerintah harus memperkuat instrumen regulatif, transparansi investasi, dan kerja sama antarnegara agar tidak menjadi objek dalam permainan geopolitik ekonomi global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *Multinational Corporation* (MNC) bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga aktor politik global yang memiliki kemampuan memengaruhi kebijakan publik, struktur kekuasaan, serta arah pembangunan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Melalui mekanisme investasi, diplomasi korporasi, dan regulasi pasar, MNC berhasil menempatkan diri sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan global yang melampaui batas yurisdiksi nasional. Dengan demikian, fenomena yang muncul bukan lagi dominasi pasar semata, melainkan bentuk governance baru yang menempatkan korporasi sebagai pengendali utama arah ekonomi-politik dunia.

Temuan menunjukkan bahwa strategi kendali ekonomi-politik MNC bersifat multidimensional menggabungkan aspek regulatif, kultural, dan ideologis. Regulasi ekonomi yang longgar, praktik *regulatory capture*, serta penetrasi ideologi kapitalisme global menciptakan struktur kekuasaan yang asimetris antara korporasi dan negara. Dalam konteks Asia Tenggara, negara-negara yang sedang berkembang cenderung menjadi pihak yang tergantung terhadap investasi asing, sehingga kedaulatan ekonominya semakin terbatas. Dinamika ini memperkuat teori ekonomi politik global yang menempatkan kapitalisme transnasional sebagai kekuatan hegemonik baru yang mengendalikan arah kebijakan internasional (Gill, 2003; Strange, 1996).

Selain melalui mekanisme formal, korporasi global juga menjalankan strategi kendali melalui pendekatan non-formal seperti diplomasi ekonomi, kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), dan cultural branding. Strategi tersebut berfungsi untuk membangun legitimasi moral dan sosial atas kehadiran korporasi di negara tuan rumah. Namun, sebagaimana ditemukan oleh Rahim dan Ahmad (2023), CSR dalam banyak kasus tidak lebih dari instrumen politik lunak yang memperkuat citra positif korporasi sambil menutupi praktik dominasi ekonomi. Akibatnya, masyarakat lokal sering kali terjebak dalam narasi pembangunan yang sebenarnya dikendalikan oleh kepentingan modal global.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya potensi perlawanan dan negosiasi dari aktor lokal, termasuk masyarakat sipil dan lembaga pemerintah yang mencoba mempertahankan kedaulatan kebijakan nasional. Gerakan sosial yang menuntut akuntabilitas dan transparansi terhadap korporasi menunjukkan bahwa kesadaran kritis masyarakat semakin meningkat. Negara-negara di Asia Tenggara mulai mengupayakan kebijakan protektif seperti pembatasan investasi asing di sektor strategis dan penerapan pajak minimum global. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun kekuatan korporasi besar, ruang bagi afirmasi kedaulatan nasional tetap ada, asalkan diiringi dengan keberanian politik dan dukungan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa relasi antara negara dan korporasi global merupakan medan tarik-menarik antara kekuasaan, kepentingan, dan ideologi. Untuk menciptakan keseimbangan, diperlukan kerangka tata kelola ekonomi-politik yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik. Negara perlu memperkuat kapasitas regulatifnya, mengembangkan kerja sama regional berbasis solidaritas ekonomi, serta memastikan bahwa globalisasi ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir korporasi, tetapi juga masyarakat luas.

Dengan demikian, kedaulatan ekonomi nasional dapat dipertahankan tanpa menutup diri dari arus globalisasi, dan Asia Tenggara dapat menjadi kawasan yang berdaya secara ekonomi sekaligus berdaulat secara politik.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, F. (2022). Nasionalisme ekonomi di era globalisasi: Perspektif ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 9*(2), 115–130.

Booth, A. (2021). The political economy of Southeast Asia.

Bungin, B. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Rajawali Pers

Carroll, T. (2021). Capitalism, conflict and contradiction: Southeast Asia's political economy.

Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications

Frank, A. G. (2021). *Dependency and development in Latin America*. Monthly Review Press

Gill, S. (2003). *Power and resistance in the new world order*. Palgrave Macmillan

Gill, S., & Law, D. (2021). *Global political economy: Perspectives, problems, and policies*. Palgrave Macmillan

Hadi, R., & Rahman, M. (2023). Deregulasi dan pengaruh korporasi asing dalam sektor energi di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 27*(1), 45–62.

Hadianto, N. K. (2022). Pandangan multinational corporations (MNC).

Hassan, M. (2021). The role of multinational corporations in shaping regulatory policies in Southeast Asia. *Asian Economic Journal, 35*(3), 245–263.

Heryanto, A. (2022). Kapitalisme dependen dan tantangan pembangunan nasional. *Jurnal Ekonomi Politik Indonesia, 10*(1), 33–50.

Hirst, P. (2020). *Globalization in question: The international economy and the possibilities of governance*. Polity Press

Hossain, M. S., et al. (2024). Impact of geopolitical risk (selected study on GPR and firms).

Hutchcroft, P. D. (2024). The politics of government–business relations in urban Southeast Asia.

Lawton, T., McGuire, S., & Rajwani, T. (2013). Corporate political activity: A literature review and research agenda. *International Journal of Management Reviews, 15*(1), 86–105.

Lim, J., & Lee, S. (2021). Corporate diplomacy and regional economic governance in ASEAN. *Asian Economic Policy Review, 16*(3), 400–420.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya

Naseemullah, A. (2022). Dependent development in the twenty-first century.

Priyono, D. (2022). Hegemoni budaya dan kapitalisme global di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora dan Politik, 11*(2), 89–107.

Putri, A., & Sari, D. (2023). Dampak sosial-ekonomi ekspansi korporasi asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14*(1), 71–86.

Rahim, M., & Ahmad, T. (2023). Corporate social responsibility dan kekuasaan terselubung korporasi global. *Jurnal Kajian Pembangunan Global, 8*(1), 22–39.

Rahmania, S. (2025). Penggaruh perusahaan multinasional di (ejurnal.politeknikpratama).

Rezza, M. (2019). Corporate social responsibility multinational corporations di (Cakrawala journal).

Rugman, A. M., & Verbeke, A. (2022). *Global corporate strategy: Multinational corporations and the global economy*. Oxford University Press

Sklair, L. (2022). *The transnational capitalist class*. Wiley-Blackwell

Strange, S. (1996). *The retreat of the state: The diffusion of power in the world economy*. Cambridge University Press

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretatif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta

Sun, P., Peng, M. W., & et al. (2021). Navigating cross-border institutional complexity: A review and agenda. PMC.

Susanti, L. (2023). Etika bisnis dan akuntabilitas korporasi transnasional. *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis, 5*(2), 90–106.

Suwarno, B. (2022). Strategi pengaruh ekonomi politik perusahaan multinasional di Asia Tenggara. *Jurnal Ekonomi Global dan Pembangunan, 7*(2), 55–73.

UNCTAD. (2023). *World investment report 2023*. UNCTAD

Widjaja, A. (n.d.). Dampak kegiatan perusahaan multinasional terhadap. LPEM.

Widodo, H. (2021). Peran negara dalam tata kelola ekonomi neoliberal. *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, 9*(3), 133–149.

Wijaya, E. (2023). Resistensi masyarakat sipil terhadap korporasi global di Asia Tenggara. *Jurnal Politik dan Masyarakat Global, 6*(2), 101–122.